

# **Persaingan Sub Sektor Peternakan dengan Sektor-Sektor Perekonomian Lainnya Di Wilayah Jawa Barat Dan Jawa Tengah (Analisis Input-Output) <sup>1</sup>**

Oleh

**Achmad Firman dan Sri Rahayu**

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran  
Jatinangor, Bandung 40600

## **Abstrak**

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah didorong untuk mampu mengembangkan sektor-sektor yang akan menjadi unggulan bagi daerahnya. Begitu pula dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah terus menggiatkan sektor-sektor yang mempunyai potensi sebagai mesin pencetak pendapatan bagi daerahnya. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan bagi ke dua propinsi ini karena masing-masing memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 14,92 % dan 20,64%. Salah satu sub sektor yang memberikan kontribusi bagi sektor pertanian adalah subsektor peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persaingan subsektor peternakan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya dan dampak penyebaran. Metode penelitian menggunakan studi kasus dan dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Data yang dianalisis adalah Data Tabel Input Output Transaksi Domestik atas Dasar Harga Produsen Klasifikasi 9 Sektor Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2000. Data dianalisis dengan menggunakan matematika ekonomi dan model input output yang dibantu dengan menggunakan program GRIMP 7.1. Hasil analisis menunjukkan bahwa subsektor peternakan di Jawa Barat mempunyai nilai keterkaitan tidak langsung kebelakang dan kedepan masing-masing sebesar 0,8356 dan 0,9176. Sedangkan Propinsi Jawa Tengah mempunyai nilai sebesar sebesar 0,8231 dan 1,1024. Berdasarkan nilai keterkaitan tersebut dapat dibuktikan tingkat persaingan subsektor peternakan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya berdasarkan dampak penyebaran. Hasilnya menunjukkan bahwa subsektor peternakan hanya menjadi sektor yang mendapat prioritas ke IV dalam pembangunan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan belum menjadi sektor unggulan di Jawa Barat. Bila kita melihat persaingan antar wilayah, khususnya Jawa Tengah, sub sektor peternakan menempati prioritas ke II dalam pembangunan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa subsektor peternakan belum menjadi sektor unggulan bagi ke dua propinsi tersebut, namun subsektor ini mempunyai potensi untuk terus dikembangkan.

***Kata Kunci:** Dampak keterkaitan dan daya penyebaran*

## **The Competition among Animal Husbandry SubSector with The Other Economic Sectors in West and Middle Java (Input – Output Analysis)**

### **Abstract**

When the regional autonomy was launched, all of regional must found the potential sector to increase regional income. The government of West and Middle Java have to be found the leading sectors to increase their regional income. Agriculture sector is one of leading sector in both of West and Middle Java Provinces cause it gave about 14,92 % and 20,64% contribution for Gross Domestic Regional Income (GDRI) to West and Middle Java. And the one of agriculture sector is animal husbandry sub sector. These research have two objectives: to know the competition among animal husbandry subsector with the other economic sectors and to know the

---

<sup>1</sup> Makalah seminar ini disampaikan untuk "Seminar Ekonoinsektif'06" yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2006 di Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat.

dispersion effect. The methodology of research is used case study with description analysis as a tool to describe the Input Output 2000 data. The result research showed that the animal husbandry sub sector at West Java did not give a good contribution to GDRI and it could not be a leading sector category cause the degree of sensitivity and power of dispersion was lower than one. The other side, animal husbandry sub sector gave a good contribution to Middle Java and it could be a leading sector category cause it had a more than one value of dispersion power.

***Key Words: Linkage Effect and Dispersion Effect***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Permasalahan yang sering dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah adanya ketimpangan dalam pembangunan. Salah satu penyebab ketimpangan tersebut adalah penyebaran investasi yang tidak merata baik dalam lingkup regional ataupun sektoral. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi pembangunan suatu wilayah.

Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Iwan Jaya Aziz (1994) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan mengikuti suatu hirarki. Hirarki ke pertama menunjukkan tujuan pembangunan, hirarki ke dua menunjukkan sektor-sektor mana yang terpilih, hirarki ke tiga menunjukkan daerah-daerah terpilih, dan hirarki ke empat menunjukkan kebijakan siasat dan langkah-langkah apa yang perlu diambil.

Berbeda dengan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Jadi, hirarki ke dua dan ke tiga pada bertukar tempat. Di dalam kenyataan, pendekatan regional sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan hanya untuk beberapa daerah tertentu, seperti daerah terbelakang, daerah perbatasan, atau daerah yang diharapkan mempunyai posisi strategis dalam arti ekonomi-politik. Karena arah yang dituju adalah gabungan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dalam dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

Berdasarkan pendekatan regional dan sektoral tersebut dan sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada awal tahun 2001, menyebabkan setiap daerah harus menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk membangun

sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Berkaitan dengan penggalian potensi dari sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka baik Propinsi Jawa Barat maupun Jawa Tengah harus mencari sumber-sumber pendapatan dari berbagai sektor yang menjadi unggulan di wilayahnya. Berbagai sumber yang potensial tersebut, selanjutnya diupayakan untuk dikembangkan melalui peningkatan investasi baik oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Sebagaimana yang kita kenal bahwa kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang berbasis pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan bagi ke dua wilayah ini karena masing-masing memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 14,92 % untuk Jawa Barat dan 22,66% Jawa Tengah pada Tahun 2000 (BPS Jawa Barat dan Jawa Tengah, Tahun 2001). Adapun subsektor peternakan yang merupakan salah satu dari subsektor pertanian turut memberikan andil yang besar dalam pembangunan kedua wilayah tersebut, memberikan kontribusi pendapatan masing masing sebesar 1,72% untuk Jawa Barat dan 3,94% bagi Jawa Tengah. Namun, apakah subsektor peternakan tersebut menjadi sektor unggulan bagi wilayahnya? Hal inilah yang akan dibahas pada tulisan ini.

### **Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persaingan subsektor peternakan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, nilai output/tenaga kerja, dan nilai net ekspor impor
2. Apakah subsektor peternakan sudah menjadi sektor unggulan di Jawa Barat dan Jawa Tengah berdasarkan dampak penyebarannya.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran subsektor peternakan terhadap perekonomian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara subsektor peternakan dengan sektor-

- sektor lainnya, baik keterkaitan dari sisi input maupun keterkaitan dari sisi output.
3. Untuk mengetahui apakah subsektor peternakan sudah menjadi sektor unggulan di Jawa Barat dan Jawa Tengah berdasarkan dampak penyebarannya

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pendekatan *Input-Output*

Dampak suatu kegiatan ekonomi secara komprehensif dapat diketahui melalui suatu analisis atau kajian yang dapat menghasilkan informasi yang mencakup dampak langsung dan tidak langsung yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Dampak langsung dari kegiatan ekonomi tersebut dapat terlihat di mana sektor tersebut ditanamkan. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah manfaat yang diperoleh sektor-sektor lainnya akibat kegiatan ekonomi tersebut.

Dampak tidak langsung dari peran suatu sektor dapat diketahui dengan menganalisa keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem ekonomi. Adanya keterkaitan ini dapat dilihat dari sisi *output* maupun dari sisi *input*. Keterkaitan dari sisi *output* disebabkan hasil produksi dari sektor tersebut akan digunakan sebagai *input* bagi sektor lainnya (*forward linkage*) sedangkan keterkaitan dari sisi *input* timbul karena sektor tersebut juga menggunakan input dari yang berasal dari sektor lainnya (*backward linkage*).

Oleh karena itu, untuk menduga dampak dari hubungan antar sektor tersebut adalah dengan menggunakan suatu alat analisis yang disebut dengan Model *Input-Output* (I-O). Model ini didasarkan pada hubungan interpedensi (saling terkait) antara sektor dalam perekonomian baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Kelebihan lain dari model ini adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran secara detail dan ringkas mengenai total output dari setiap sektor dan kebutuhannya terhadap produksi dan sumberdaya, digunakan untuk memprediksi dampak perubahan yang terjadi pada suatu sektor terhadap sektor lainnya secara keseluruhan. Kelebihan tersebut menyebabkan model ini banyak digunakan untuk menganalisis perencanaan pembangunan.

Model I-O pertama kali diperkenalkan oleh Wassily Leontif pada akhir tahun 1930-an (Miller and Blair, 1985). Pada akhirnya model ini terus berkembang sejalan dengan

pertumbuhan pembangunan ekonomi. Model I-O Leontif ini didasarkan atas model keseimbangan umum (*general equilibrium*) yang memiliki konsep dasar sebagai berikut:

- a. Struktur perekonomian tersusun dari beberapa sektor yang saling berinteraksi melalui transaksi jual beli.
- b. Output suatu sektor dijual kepada sektor lainnya dan untuk memenuhi permintaan akhir.
- c. Input suatu sektor dibeli dari sektor lain yaitu rumah tangga (dalam bentuk tenaga kerja), pemerintah (pajak), penyusutan, surplus usaha dan impor wilayah lain.
- d. Hubungan antara *output* dan *input* bersifat linear dan dalam suatu periode analisis (satu tahun) jumlah total *input* sama dengan total *input*.
- e. Suatu sektor terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dan tiap sektor hanya menghasilkan satu *output* dengan satu tingkat teknologi.

Analisa model I-O biasanya disajikan dalam bentuk tabel I-O yang memudahkan kita dalam menggambarkan hubungan transaksi (*supply* dan *demand*) antara berbagai sektor perekonomian. Tabel ini menunjukkan arus transaksi ekonomi antar sektor dalam matrik. Baris pada tabel I-O menunjukkan transaksi penjualan dari suatu sektor ke sektor lainnya dan ke permintaan akhir. Sedangkan kolom pada tabel I-O menunjukkan transaksi pembelian dari suatu sektor ke sektor lainnya dan dari *input* primer.

Tabel I-O sederhana terbagi menjadi empat bagian, yaitu kuadran I, II, III, dan IV seperti yang terlihat pada Gambar 1. Menurut Jansen dan West (1986) pembagian ini sangat penting untuk dapat memahami ketergantungan ekonomi dan gambaran holistik masing-masing sektor. Ke empat kuadran tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kuadran I (*Intermediate Quadrant*)**. Kuadran ini merupakan bagian yang terpendung dalam tabel I-O karena menggambarkan keterkaitan antar sektor-sektor perekonomian sehingga menjadi dasar analisis keterkaitan antar sektor tersebut.
2. **Kuadran II (*Final Demand Quadrant*)**. Menunjukkan penjualan barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor-sektor perekonomian untuk memenuhi permintaan akhir. Komponen permintaan akhir terdiri dari pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah,

pembentukan modal tetap, perubahan stok, dan ekspor yang merupakan sisi pengeluaran wilayah sehingga termasuk komponen perhitungan *Gross Domestic Regional Product* dari sisi pengeluaran.

3. **Kuadran III (Primary Input Quadrant).** Menunjukkan pembelian input yang dihasilkan diluar sistem produksi oleh sektor-sektor dalam kuadran antara. Secara umum yang termasuk dalam kuadran ini adalah pendapatan rumah tangga (upah/gaji), pajak tak langsung, surplus usaha, dan penyusutan. Jumlah seluruh nilai tambah ini akan menghasilkan produk domestik bruto yang dihasilkan di wilayah domestik. Selanjutnya nilai ini akan sama jumlahnya dengan seluruh permintaan akhir dikurangi dengan impor barang dan jasa.
4. **Kuadran IV (Primary Input-Final Demand Quadrant).** Menunjukkan transaksi langsung antara kuadran input primer dengan permintaan akhir tanpa melalui sistem produksi atau kuadran antara.

Dalam penerapan model I-O terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu (Jesen and West, 1986):

- a. *Homogenitas*, yang menyatakan bahwa tiap-tiap sektor menghasilkan suatu output tunggal dengan susunan input tunggal (suatu metode produksi) dan tidak ada substitusi antar output dari berbagai sektor.
- b. *Proporsionalitas*, menyatakan bahwa dalam proses produksi hubungan antara *input* dan *output* adalah linear dan homogen. Artinya bahwa satu sektor akan merubah sebanding dengan berubahnya total output sektor tersebut.
- c. *Aditivitas*, menyatakan bahwa efek total dari pelaksanaan produksi di berbagai sektor ekonomi dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah.

Selain asumsi-asumsi di atas, model I-O ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diketahui agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikan hasil analisisnya. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien I-O yang konstan selama periode analisis sehingga perubahan-perubahan seperti perubahan teknologi atau perubahan harga relative yang mungkin terjadi selama periode analisis diabaikan. Hal ini menyebabkan harus

dilakukan penyesuaian terhadap koefisien agar tidak menimbulkan bias terhadap hasil prediksi.

- b. Semakin banyak agregasi dilakukan terhadap sektor-sektor yang ada akan menyebabkan semakin besar pula kecenderungan pelanggaran terhadap asumsi homogenitas dan semakin banyak informasi ekonomi yang lebih terperinci tidak terungkap dalam analisisnya.
- c. Keterbatasan yang disebabkan besarnya dana dalam penyusunan tabel I-O dengan metode survey.

### Analisis Keterkaitan

Konsep keterkaitan biasa digunakan sebagai dasar perumusan strategi pembangunan ekonomi dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem perekonomian. Konsep keterkaitan yang biasa dirumuskan meliputi keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang menunjukkan hubungan keterkaitan antar industri/sektor dalam pembelian terhadap total pembelian dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang menunjukkan hubungan keterkaitan antar industri/sektor dalam penjualan terhadap total penjualan.

Berdasarkan konsep ini dapat diketahui besarnya pertumbuhan suatu sektor yang dapat menstimulir pertumbuhan sektor lainnya melalui mekanisme induksi (Jensen and West, 1986). Keterkaitan antar sektor perekonomian dalam pembelian dan penjualan input antara ditunjukkan oleh koefisien langsung, sedangkan keterkaitan tidak langsung dan langsungnya (total) ditunjukkan dari matrik leontief. Matrik Leontief disebut sebagai matrik koefisien keterkaitan karena matrik ini mengandung informasi penting tentang struktur perekonomian yang dipelajari dengan menentukan tingkat keterkaitan antar sektor perekonomian.

Dengan konsep keterkaitan tersebut dapat pula digunakan untuk menganalisis keterkaitan ketenagakerjaan dan keterkaitan pendapatan antar sektor perekonomian. Pertumbuhan suatu sektor akan merangsang pertumbuhan tenaga kerja dan perubahan pendapatan di sektor lainnya yang berkaitan dengan sektor tersebut.

### Dampak Penyebaran

Analisis dampak penyebaran digunakan untuk mengetahui sektor mana

yang menjadi sektor unggulan (leading sector) dalam pembangunan suatu wilayah. Untuk menghitung dampak penyebaran, ada dua perhitungan yang dilakukan, yaitu menghitung derajat kepekaan (*degree of sensitivity*), yaitu peningkatan output sektor tersebut dapat meningkatkan sektor hilirnya, dan daya penyebaran (*power of dispersion*), yaitu keberadaan sektor tersebut dapat mendorong sektor hulu. Kedua perhitungan di atas menggunakan analisis keterkaitan ke depan dan ke belakang secara tidak langsung. Ada beberapa kriteria di mana suatu sektor dijadikan prioritas atau unggulan dari suatu daerah (Rasmussen dalam Daryanto dan Morison tahun 1992), yaitu:

1. Sektor tersebut masuk ke prioritas I, jika memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan lebih besar dari satu.
2. Sektor tersebut masuk ke prioritas ke II, jika memiliki daya penyebaran lebih dari satu dan derajat kepekaan lebih kecil dari satu.
3. Sektor tersebut masuk ke prioritas ke III, jika memiliki daya penyebaran lebih kecil dari satu dan derajat kepekaan lebih dari satu.
4. Sektor tersebut masuk ke prioritas ke IV, jika memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan lebih kecil dari satu.

## METODE PENELITIAN

### Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini sebagian besar berasal dari tabel I-O tahun 2000 yang dihasilkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk keperluan penelitian ini digunakan tabel dasar transaksi domestik atas dasar harga produsen klasifikasi 66 sektor yang kemudian diagregasi menjadi 13 sektor untuk memudahkan analisis dan penyesuaian terhadap data lain yang tersedia. Untuk mendukung analisis penelitian ini, juga digunakan data sekunder dari instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian.

### Analisis Keterkaitan

Konsep keterkaitan yang biasa dirumuskan meliputi keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*). Keterkaitan ke belakang menunjukkan akibat suatu sektor terhadap sektor-sektor yang menggunakan sebagian output sektor secara langsung per unit kenaikan permintaan total yang dirumuskan sebagai berikut:

$$F_i = \frac{\sum_{j=1}^n X_{ij}}{X_i} = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

Dimana:

- $F_i$  = keterkaitan langsung ke depan  
 $X_{ij}$  = banyak output sektor i yang digunakan sektor ke j  
 $X_i$  = total output sektor i (antara dan akhir)  
 $a_{ij}$  = unsur matrik koefisien teknis

Sedangkan keterkaitan ke depan menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total.

$$B_j = \frac{\sum_{i=1}^n X_{ji}}{X_j} = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

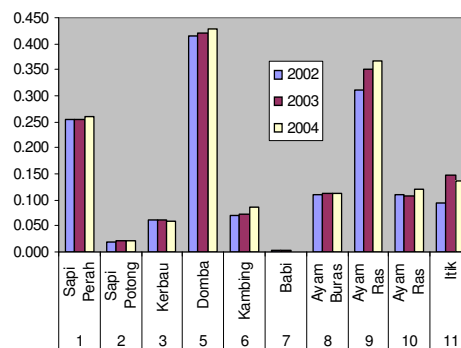
Dimana:

- $B_j$  = keterkaitan langsung ke belakang  
 $X_{ji}$  = banyak output sektor j yang digunakan sektor ke i  
 $X_j$  = total output sektor j (antara dan akhir)  
 $a_{ij}$  = unsur matrik koefisien teknis

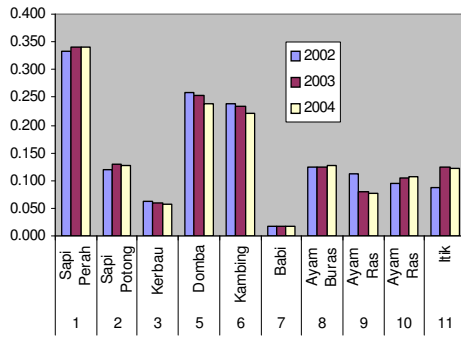
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Populasi Ternak

Subsektor peternakan merupakan subsektor yang memberikan sumbangan protein hewani bagi kebutuhan pangan manusia. Jumlah populasi ternak yang dimiliki oleh Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.



**Gambar 1. Populasi Ternak di Jawa Barat**  
(Sumber: Statistik Peternakan Ditjen Peternakan berbagai tahun)

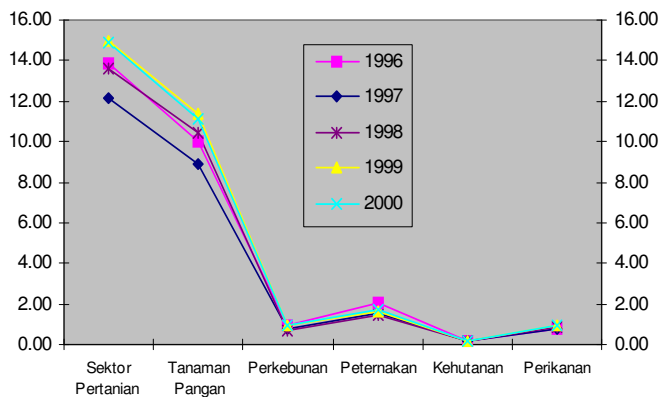


**Gambar 2. Populasi Ternak di Jawa Tengah**  
(Sumber: Statistik Peternakan Ditjen Peternakan berbagai tahun)

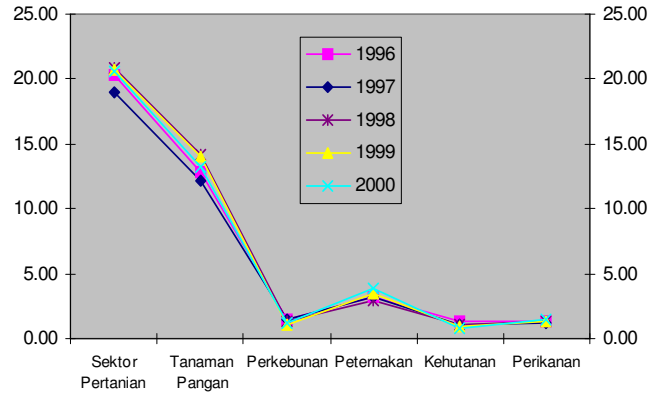
Bila dilihat dari kedua gambar tersebut, Jawa Barat memiliki keunggulan dari sisi ternak ayam ras pedaging dan ternak domba. Hal ini sangat wajar karena di wilayah Jawa Barat banyak terdapat perusahaan perbibitan DOC dan Jawa Barat merupakan wilayah produksi ternak domba. Sedangkan Jawa Tengah memiliki keunggulan dari sisi ternak Sapi Perah dan ternak Kambing karena hal ini didukung oleh sumber daya alam yang dimiliki oleh Jawa Tengah.

### Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB

Adapun kontribusi pendapatan yang diberikan oleh subsektor peternakan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing wilayah tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB



**Gambar 3. Kontribusi Sektor Pertanian di Jawa Barat**  
(Sumber: BPS Jawa Barat berbagai tahun)



**Gambar 4. Kontribusi Sektor Pertanian di Jawa Tengah**  
(Sumber: BPS Jawa Tengah berbagai tahun)

Propinsi Jawa Barat menduduki urutan ke dua dalam sektor pertanian setelah tanaman pangan, yaitu dengan memberikan sumbangan sebesar 1,59% dan 1,72% pada Tahun 1999 dan 2000. Sedangkan di Propinsi Jawa Tengah subsektor peternakan menempati urutan ke dua juga setelah tanaman pangan. Hanya saja kontribusi pendapatan yang diberikan subsektor peternakan persentasenya lebih besar dibandingkan dengan di Jawa Barat, yaitu sebesar 3,43% dan 3,94% pada Tahun 1999 dan 2000.

### Nilai Output Per Tenaga Kerja

Bila dilihat dari sisi output yang dihasilkan oleh masing-masing sektoral dengan jumlah tenaga kerja yang diserap masing-masing sektoral, maka terdapat nilai output per tenaga kerja yang berbeda-beda untuk masing-masing sektor. Semakin tinggi nilai output per tenaga kerja menunjukkan semakin efisien sektor tersebut dalam menghasilkan produk. Artinya, tenaga kerja yang diserap oleh sektor dapat menghasilkan output yang besar. Tentunya hal ini akan sangat bertolak belakang dengan sektor pertanian karena sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja dan sering disebut sebagai sektor padat karya. Hal ini dapat dilihat dari nilai output per tenaga kerja yang menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (lihat Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1, nilai output per tenaga kerja untuk sektor pertambangan dan galian, sektor bangunan, dan sektor keuangan untuk Propinsi Jawa Barat masing-

masing menduduki urutan satu, kedua, dan ketiga. Sektor pertambangan dan galian memberikan nilai output per tenaga kerja sebesar 271,28 rupiah/orang. Artinya setiap satu orang yang bekerja di sektor pertambangan dan galian menghasilkan output sebesar Rp 271,28 juta pertahunnya. Sedangkan subsektor peternakan menduduki urutan ke 12 dari 13 sektor perekonomian Jawa Barat dengan menyumbang nilai output per tenaga kerja sebesar 4,69 rupiah/orang. Artinya setiap satu orang pekerja menghasilkan Rp 4,69 juta pertahunnya.

Sektor yang mempunyai nilai output per tenaga kerja yang terbesar di Propinsi Jawa Tengah adalah sektor listrik, gas, dan air, sektor keuangan dan sektor industri pengolahan. Sedangkan subsektor peternakan menduduki urutan ke 11 dari 13 sektor dalam perekonomian Jawa Tengah dengan menyumbangkan nilai output per tenaga kerja sebesar 3,69 rupiah/orang. Artinya, setiap satu orang yang bekerja di subsektor peternakan menghasilkan output sebesar Rp 3,69 juta pertahunnya.

**Tabel 1. Nilai Output/Tenaga Kerja di Jawa Barat dan Jawa Tengah**

No	Sektor	Output/Tenaga Kerja	
		Jawa Barat	Jawa Tengah
1	Pertanian	12.88	5.71
	a. Tanaman Pangan	24.46	9.26
	b. Perkebunan	6.6	4.18
	<b>c. Peternakan</b>	<b>4.69</b>	<b>3.69</b>
	d. Kehutanan	0.84	2.31
	e. Perikanan	7.67	2.79
2	Pertambangan dan Galian	271.28	16.94
3	Industri Pengolahan	76.98	43.81
4	Listrik, Gas dan Air	226.62	85.83
5	Bangunan/Konstruksi	25.87	18.75
6	Perdag, Hotel dan Rest	13.94	10.74
7	Transport dan Komunik	15.94	12.59
8	Keuangan	110.28	85.57
9	Jasa-jasa	13.41	10.03

Sumber: BPS, Tahun 2000 (Data diolah dari I-O Tahun 2000)

### Net Ekspor – Impor

Satu hal yang sering dijadikan acuan bahwa sektor tersebut memiliki nilai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) adalah input primer yang digunakan sebagai bahan baku dasar berasal dari sumber daya lokal (*local content*) dan output yang dihasilkan diusahakan untuk

ekspor sehingga nilai net ekspor – impornya akan surplus.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai net ekspor impor yang diperoleh Jawa Barat secara keseluruhan sebesar Rp 6,97 triliun sedangkan Jawa Tengah menghasilkan Rp 28,52 triliun. Artinya adalah banyak sektor di Jawa Barat yang menggunakan sumber daya impor untuk memproduksi output. Adapun subsektor peternakan di Jawa Barat memberikan sumbangan negatif terhadap ekspor impornya, yaitu Rp -146,87 milyar. Sedangkan subsektor peternakan di Propinsi Jawa Tengah memberikan sumbangan positif, yaitu sebesar Rp 61,6 milyar. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa sektor peternakan di Jawa Barat lebih banyak menggunakan sumber daya impor untuk menghasilkan outputnya.

**Tabel 2. Net Ekspor Impor Sektor-sektor Perekonomian di Jawa Barat dan Jawa Tengah**

Sektor	Selisih Ekspor Impor (Rp juta)	
	Jawa Barat	Jawa Tengah
1. Pertanian	-2497307	4035476
a. Tanaman Pangan	-1865399	3615055
b. Perkebunan	-57792	55576
<b>c. Peternakan</b>	<b>-146867</b>	<b>61595</b>
d. Kehutanan	-12448	86446
e. Perikanan	-414801	216805
2. Pertambangan dan Galian	0	24825
3. Industri Pengolahan	553956	20895444
4. Listrik, Gas dan Air	301781	-481465
5. Bangunan/Konstruksi	-1376658	-1675880
6. Perdag, Hotel & Restoran	283133	6624932
7. Transport & Komunik	322627	602577
8. Keuangan	116059	-339535
9. Jasa-jasa	9263660	-1163453
<b>Total</b>	<b>6967251</b>	<b>28522920</b>

Sumber: BPS, Tahun 2000 (Data diolah dari I-O Tahun 2000)

### Dampak Penyebaran

Berdasarkan beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa persaingan subsektor peternakan dengan sektor-sektor perekonomian di Jawa Barat dan Jawa Tengah belum memberikan nilai yang maksimal, dihitung dari kontribusi pendapatan terhadap PDRB, nilai output/tenaga kerja, dan nilai net ekspor impor.

Subsektor peternakan di Jawa Barat belum mampu memberikan andil yang cukup

besar dilihat dari kontribusi pendapatan terhadap PDRB dan nilai net ekspor impor. Namun, subsektor ini memberikan nilai tambah yang baik terhadap nilai output/tenaga kerja. Adapun di Jawa Tengah, subsektor peternakan cukup memberikan andil dalam perekonomian Jawa Tengah terutama dalam kontribusinya terhadap PDRB dan nilai ekspor impor.

Untuk memberikan gambaran apakah subsektor peternakan menjadi unggulan dalam perekonomian wilayah masing-masing, dapat dilihat dari daya penyebaran subsektor tersebut terhadap perekonomian wilayah. Sebagaimana telah diterangkan di atas, analisis dampak penyebaran digunakan untuk mengetahui sektor mana yang menjadi sektor unggulan (*leading sector*) dalam pembangunan suatu wilayah.

Ada dua perhitungan yang dilakukan untuk menghitung dampak penyebaran (*Dispersion Effect*), yaitu menghitung derajat kepekaan (*degree of sensitivity*), yaitu peningkatan output sektor tersebut dapat meningkatkan sektor hilirnya, dan daya penyebaran (*power of dispersion*), yaitu keberadaan sektor tersebut dapat mendorong sektor hulu. Adapun beberapa kriteria di mana suatu sektor dijadikan prioritas atau unggulan dari suatu daerah adalah sebagai berikut:

1. Sektor tersebut masuk ke prioritas I, jika memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan lebih besar dari satu.
2. Sektor tersebut masuk ke prioritas ke II, jika memiliki daya penyebaran lebih dari satu dan derajat kepekaan lebih kecil dari satu.
3. Sektor tersebut masuk ke prioritas ke III, jika memiliki daya penyebaran lebih kecil dari satu dan derajat kepekaan lebih dari satu.
4. Sektor tersebut masuk prioritas ke IV, jika memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan lebih kecil dari satu.

Hasil analisis dengan menggunakan analisis keterkaitan untuk menentukan klasifikasi penentuan prioritas dan sektor unggulan perekonomian dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa subsektor peternakan merupakan sektor perekonomian yang mendapat prioritas ke IV dalam pembangunan Jawa Barat dengan nilai derajat kepekaan (0.8356) dan daya penyebaran (0.9176)

kurang dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan belum menjadi sektor unggulan di Jawa Barat. Bila kita melihat persaingan antar wilayah, khususnya Jawa Tengah, sub sektor peternakan menempati prioritas ke II dengan nilai derajat kepekaan dan daya penyebaran masing-masing sebesar 0,8231 dan 1,1024. Oleh karena itu, agar subsektor peternakan menjadi subsektor unggulan, maka produksi harus ditingkatkan dengan lebih menggunakan sumber daya lokal sebagai input primer guna memperkecil input produksi dari bahan baku impor sehingga diharapkan subsektor peternakan di Jawa Barat bisa menjadi sektor unggulan.

**Tabel 3. Derajat Kepekaan dan Daya Penyebaran dari Sektor-sektor Perekonomian di Jawa Barat dan Jawa Tengah**

Sektor	Jawa Barat		Jawa Tengah	
	Derajat Kepekaan	Daya Penyebaran	Derajat Kepekaan	Daya Penyebaran
Tanaman Pangan	0.7546	0.8827	1.0474	0.8149
Perkebunan	1.8847	0.8274	0.7935	0.8785
<b>Peternakan</b>	<b>0.8356</b>	<b>0.9176</b>	<b>0.8231</b>	<b>1.1024</b>
Kehutanan	2.7653	0.8398	0.7815	0.8729
Perikanan	0.6418	1.1046	0.8045	0.9075
Pertambangan dan Galian	0.7217	0.9121	0.8252	0.8801
Industri Pengolahan	0.8455	1.2805	1.9304	1.2034
Listrik, Gas dan Air	0.7597	1.2096	0.8623	1.1551
Bangunan/ Konstruksi	0.6007	1.2132	0.8819	1.1791
Perdag, Hotel dan Rest	0.7250	0.9567	1.2619	1.0463
Transport & Komunik	0.8523	1.0706	0.9878	1.0842
Keuangan	0.9644	0.9300	1.0977	0.8758
Jasa-jasa	0.6486	0.8551	0.9009	0.9996

Sumber: BPS, Tahun 2000 (Data diolah dari I-O Tahun 2000)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan adalah:

1. Persaingan subsektor peternakan di Jawa Barat belum mampu bersaing dengan sektor-sektor lainnya dilihat dari sisi kontribusi pendapatan terhadap PDRB dan nilai net ekspor impor. Sedangkan subsektor peternakan di Jawa Tengah mampu bersaing dengan sektor-sektor lainnya walaupun masih dibawah sektor industri pengolahan dan sektor listrik, air, dan gas
2. Hasil dampak penyebaran menunjukkan bahwa subsektor peternakan di Jawa

Barat hanya menjadi prioritas ke IV dalam pembangunan dan bukan menjadi sektor unggulan sedangkan subsektor peternakan di Jawa Tengah menjadi prioritas ke II dan dapat dikatakan sebagai sektor unggulan.

#### **Saran**

Oleh karena itu dapat disarankan bahwa agar subsektor peternakan menjadi subsektor unggulan, maka peningkatan produksi harus terus dilakukan dengan lebih menggunakan sumber daya lokal. Tujuan penggunaan sumber daya lokal adalah untuk memperkecil input produksi yang bersumber dari bahan baku impor sehingga diharapkan subsektor peternakan di Jawa Barat bisa menjadi sektor unggulan seperti di Jawa Tengah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Firman. 2002. Dampak Investasi Subsektor Peternakan Terhadap Perekonomian Jawa Barat. Fakultas Peternakan. Universitas Padjadjaran. Bandung
- Biro Pusat Statistik. 1990. Tabel Input-Output Indonesia Tahun 1985. Biro Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1992. Statistik Indonesia Tahun 1990. Biro Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1995. Tabel Input-Output Indonesia Tahun 1995. Biro Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. Tabel Input-Output Jawa Barat Tahun 2000. Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2000. Tabel Input-Output Jawa Tengah Tahun 2000. Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Bandung.
- Beni Firmansyah. 2005. Dampak Subsektor Peternakan Terhadap Perekonomian Jawa Tengah. Fakultas Peternakan. Universitas Padjadjaran. Bandung
- Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian. 1999. Buku Statistik Peternakan Tahun 1999. Direktorat Jenderal Peternakan Republik Indonesia dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Jakarta.
- Esmara, Hendra. 1993. Perencanaan Pembangunan. Pusat Antar

- Universitas Studi Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jensen, R.C and G.R. West. 1986. Input-Output for Practitioners: Theory and Application. Australian Government Publishing Service. Canberra.
- Masjidin Siregar. 1993. Income and Employment Impacts of Indonesian Agricultural Sectors. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLI No. 4. Jakarta.
- Miller, R.E and Blair. P.D. 1985. Input-Output Analysis: Foundation and Extension. Prentice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey.
- Tjandrawan, Iwan. 1994. Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Nasional (Analisis Input-Output). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor